

# Relasi Kuasa Dan Kekerasan Seksual Dalam Tayub Bojonegoro

Susetyo Adhi Pramono<sup>1\*</sup> dan Arief Sudrajat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISIPOL-Unesa

[susetyo.18050@mhs.unesa.ac.id](mailto:susetyo.18050@mhs.unesa.ac.id)

## Abstract

*This research explores how power relations and gender-based violence operate within the traditional Tayub dance performance in Bojonegoro. Employing a descriptive qualitative approach and Foucault's theory of power, the study reveals that Tayub dancers frequently experience sexual harassment legitimized through cultural and social norms. What was once a sacred performance has been transformed into commodified entertainment, wherein the female body is exploited under the guise of tradition. The findings emphasize the need for cultural re-evaluation, legal protection for dancers, and educational efforts to dismantle normalized violence.*

*Keywords: power relations; sexual harassment; tayub; local culture; gender*

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana relasi kuasa dan kekerasan berbasis gender berlangsung dalam pertunjukan tari Tayub di Bojonegoro. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori kekuasaan Michel Foucault, ditemukan bahwa penari Tayub kerap mengalami pelecehan seksual yang dilegitimasi melalui norma budaya dan sosial. Tayub yang dulunya bersifat sakral berubah menjadi hiburan komersial yang mengeksploitasi tubuh perempuan atas nama tradisi. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi budaya, perlindungan hukum terhadap penari, dan pendidikan masyarakat untuk membongkar kekerasan yang telah dinormalisasi.

Kata kunci : relasi kuasa; pelecehan seksual; tayub; budaya lokal; gender

## 1. Pendahuluan

Kesenian tayub merupakan salah satu warisan budaya tradisional yang tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan yang akan sarat dengan interaksi sosial, kesenian tayub melibatkan partisipasi langsung dari penari tayub (ledhek) dan penonton laki-laki (penayub) sehingga menciptakan ruang sosial yang unik namun juga penuh dengan kerentanan. Di balik keindahan Gerak dan harmonisasi musik, praktek kesenian tayub seringkali memunculkan problematikaserius khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan, seksualitas dan pelecehan seksual terhadap tubuh Perempuan sebagai subjek utama dalam pertunjukan kesenian tayub.

Fenomena pelecehan seksual dalam kesenian tayub di Bojonegoro menjadi hal yang nyata dari kompleksitas relasi kuasa dalam Masyarakat patriarkal. Budaya patriaki, normalisasi interaksi bebas, serta minimnya apresiasi Masyarakat terhadap seni tradisional menyebabkan kesenian tayub mengalami pergeseran makna dari bentuk ekspresi budaya menjadi tontonan yang erotis. Pergeseran ini diperkuat dengan adanya tekanan sosial, ekonomi dan budaya yang mengharuskan para penari menerima bentuk-bentuk pelecehan seksual sebagai bagian dari “Profesionalitas” mereka dalam bekerja.

Banyaknya kasus pelecehan yang terjadi dalam pagelaran Tayub, baik secara verbal maupun nonverbal, sering kali tidak dianggap sebagai pelanggaran karena telah ternormalisasi dalam kerangka adat dan budaya lokal. Kebiasaan saweran yang semula dimaknai sebagai bentuk apresiasi kepada seniman, kini telah mengalami penyimpangan makna menjadi tindakan simbolik dari dominasi kuasa laki-laki atas tubuh perempuan. Hal ini diperparah dengan keberadaan penonton yang mabuk dan tidak terkendali,

serta ketiadaan regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi penari sebagai pekerja seni.

Dengan menggunakan pendekatan teori relasi kuasa dari Michael Foucault, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana mekanisme kuasa bekerja secara sistemik melalui tubuh, norma sosial, dan struktur ekonomi, hingga menjadikan tubuh perempuan sebagai objek eksploitasi yang dilegitimasi oleh tradisi. Kesenian Tayub dalam konteks ini bukan hanya menjadi ruang estetika, tetapi juga ruang politis di mana terjadi pertarungan antara dominasi dan resistensi, antara kuasa dan subordinasi.

Penelitian ini penting untuk mengungkap dimensi struktural dari praktik pelecehan seksual dalam kesenian tradisional, serta membuka ruang refleksi kritis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam melindungi seniman perempuan dari kekerasan berbasis gender. Dengan memahami hubungan antara kekuasaan dan seksualitas dalam konteks lokal, diharapkan lahir kebijakan dan pendekatan kultural yang lebih adil dan berperspektif gender dalam pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas Tayub dari aspek estetika atau sejarah, namun belum banyak yang menyoroti dimensi kekuasaan dan kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antara penari dan penonton. Maka dari itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengangkat fokus pada relasi kuasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja dalam memproduksi dan melegitimasi pelecehan seksual dalam kesenian Tayub, serta bagaimana makna kesenian ini mengalami pergeseran akibat normalisasi kekerasan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan terdiri dari penari Tayub, pemimpin sanggar seni dan tokoh Masyarakat Analisis data menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak selalu represif, tetapi produktif dan tersebar melalui relasi sosial. Data dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan Kesimpulan.

## **3. Hasil Penelitian**

### **3.1. Relasi Kuasa dalam Praktik Sosial Kesenian Tayub**

Praktik pelecehan seksual terhadap penari Tayub tidak dapat dipahami secara linier sebagai tindakan individual semata. Hal tersebut merupakan hasil dari sistem kuasa yang tersebar, mengalir, dan termanifestasi dalam praktik sosial dan budaya kesenian Tayub. Pendekatan teori relasi kuasa Michel Foucault sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana kuasa tidak hanya bekerja secara represif, melainkan juga bersifat produktif menghasilkan norma, struktur perilaku, dan identitas sosial.

Kesenian Tayub di Bojonegoro tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya, tetapi juga merupakan ruang sosial tempat berlangsungnya praktik kuasa yang kompleks. Dalam konteks ini, relasi kuasa tidak bersifat tunggal atau vertikal semata, melainkan berlangsung secara menyebar dan tersembunyi melalui interaksi sosial, simbol budaya, dan praktik ekonomi dalam pertunjukan. Tayub, sebagai bagian dari kesenian rakyat yang melibatkan interaksi langsung antara penari perempuan dan penonton laki-laki, menjadi medan sosial yang rawan terhadap ketimpangan relasi gender dan kuasa.

Penari Tayub menempati posisi sosial yang ambigu. Di satu sisi, mereka dibutuhkan sebagai subjek utama pertunjukan, namun di sisi lain tubuh mereka juga menjadi objek dominasi dan konsumsi publik. Relasi ini menunjukkan adanya kekuasaan yang bersifat relasional dan difus sebagaimana dijelaskan oleh Michel Foucault, kuasa tidak hanya bekerja secara represif, tetapi juga produktif, yakni membentuk norma, etika, serta identitas sosial yang mengatur bagaimana tubuh dan perilaku perempuan harus ditampilkan.

Normalisasi tindakan-tindakan melecehkan seperti pelukan paksa, sentuhan fisik tanpa izin, dan komentar seksual dalam konteks Tayub memperlihatkan bahwa kekuasaan telah terlembaga dalam bentuk-bentuk interaksi sosial yang dibingkai sebagai “tradisi budaya”. Tindakan yang secara sosiologis dapat dikategorikan sebagai kekerasan gender yang sering kali dimaklumi oleh masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari dinamika pertunjukan yang wajar. Dalam ruang ini, kekuasaan hadir dalam bentuk relasi yang terselubung melalui ekspektasi sosial, tekanan budaya, serta struktur ekonomi yang membatasi agensi penari.

Kuasa juga termanifestasi dalam bentuk pengawasan sosial yang membentuk disiplin tubuh penari. Mereka dituntut untuk selalu tersenyum, bersikap terbuka, dan tidak menolak interaksi dengan penonton, bahkan ketika itu melecehkan. Bentuk-bentuk pengawasan ini bersifat panoptik: penari tidak hanya diawasi oleh orang lain, tetapi juga menginternalisasi ekspektasi sosial sehingga secara sukarela menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Inilah bentuk kuasa yang bekerja secara halus namun efektif, yang menurut Foucault, menjadikan individu sebagai agen sekaligus objek kekuasaan.

Relasi kuasa dalam Tayub juga berkait erat dengan ekonomi. Ketergantungan penari terhadap pendapatan dari pertunjukan dan saweran memperkuat posisi subordinat mereka. Penonton, terutama laki-laki dengan posisi sosial dan ekonomi lebih tinggi, memiliki kontrol yang tidak seimbang dalam hubungan tersebut. Dengan kata lain, praktik sosial Tayub merepresentasikan struktur sosial yang memproduksi dan mereproduksi ketimpangan kuasa berbasis gender, ekonomi, dan budaya secara bersamaan.

Dalam perspektif sosiologi kritis, relasi kuasa dalam Tayub mencerminkan cara struktur sosial bekerja dalam keseharian di mana kekuasaan hadir melalui simbol, interaksi, dan nilai-nilai budaya yang terkesan alamiah, padahal sejatinya bersifat ideologis dan hegemonik. Oleh karena itu, Tayub tidak hanya perlu dibaca sebagai praktik seni, tetapi juga sebagai cerminan struktur masyarakat yang perlu dikaji secara kritis dalam konteks relasi sosial, kekuasaan, dan gender.

### **3.2. Relasi Kuasa dan Kekerasan Terselubung dalam Praktik Sosial Kesenian Tayub**

Kesenian Tayub di Bojonegoro bukan sekadar ruang pertunjukan tradisional, tetapi juga merupakan arena tempat berlangsungnya relasi kuasa yang kompleks dan terselubung. Dalam ruang ini, tubuh penari perempuan menjadi pusat kontrol sosial, simbol budaya, dan komoditas ekonomi yang dimaknai dan dikendalikan oleh sistem sosial patriarkal. Empat elemen utama yang saling terkait memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam bentuk yang tidak selalu terlihat, namun sangat menentukan posisi, perilaku, dan batas kebebasan para penari.

Pertama, tidak adanya ruang penolakan menjadi bentuk nyata dari dominasi struktural. Dalam praktik pertunjukan, penari dituntut untuk bersikap ramah, terbuka, dan kooperatif terhadap penonton, bahkan ketika terjadi interaksi yang melecehkan secara fisik maupun verbal. Penolakan terhadap ajakan menari, sentuhan tubuh, atau bentuk saweran yang melecehkan dapat berdampak pada reputasi penari dan kesempatan tampil di masa depan. Tidak ada sistem yang memberi legitimasi atau perlindungan terhadap hak untuk menolak, menjadikan kekuasaan atas tubuh penari sebagai hal yang dilegalkan dalam praktik sosial kesenian.

Kedua, penari mengalami tekanan batin yang mendalam akibat ketakutan terhadap isolasi sosial. Dalam komunitas seni maupun masyarakat luas, penari yang berani menolak interaksi yang dianggap “lazim” dalam Tayub sering kali diberi label negatif seperti “tidak sopan”, “tidak profesional”, atau “tidak menghormati tradisi”. Ketakutan ini menjadi mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga ketaatan. Penari akhirnya lebih memilih menyesuaikan diri dan menekan perasaannya demi mempertahankan posisi dalam ruang pertunjukan.

Ketiga, kuasa dalam diskursus dan representasi budaya menjadi alat utama dalam melegitimasi dominasi. Diskursus tentang Tayub sebagai seni tradisi yang bersifat sensual melahirkan pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang melecehkan. Representasi penari sebagai “penghibur laki-laki”

dibentuk secara kolektif melalui bahasa, cerita, dan nilai-nilai yang diturunkan antargenerasi. Tubuh perempuan tidak lagi dimaknai sebagai medium seni, melainkan sebagai ruang simbolik yang boleh diakses secara sosial oleh laki-laki melalui tradisi saweran dan interaksi panggung. Dalam kerangka ini, budaya berfungsi sebagai alat kekuasaan yang memproduksi pengetahuan, norma, dan identitas subordinat bagi perempuan.

Keempat, seluruh sistem tersebut bekerja melalui reproduksi relasi kuasa secara sistemik. Kekuasaan tidak hanya beroperasi dalam relasi langsung antara pelaku dan korban, tetapi dipelihara oleh struktur sosial dan budaya yang lebih luas. Nilai-nilai adat, praktik ekonomi pertunjukan, norma sosial desa, serta absennya kebijakan perlindungan bagi pekerja seni perempuan secara bersama-sama menciptakan tatanan yang terus mereproduksi ketimpangan. Sistem ini tidak hanya diam terhadap kekerasan, tetapi secara aktif membentuk kesadaran kolektif yang membenarkannya.

Dengan demikian, praktik sosial dalam kesenian Tayub mencerminkan bentuk kekuasaan yang tidak hanya hadir secara kasat mata, melainkan juga melalui mekanisme halus yang menyusup ke dalam norma, identitas, dan perilaku sosial. Penari Tayub tidak hanya menjadi objek pelecehan, tetapi juga menjadi subjek yang dibentuk oleh sistem nilai yang memaksanya menerima kekerasan sebagai bagian dari profesi dan tradisi. Pemahaman ini penting untuk membuka jalan menuju kritik sosial, perubahan budaya, serta kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender dalam ruang budaya tradisional.

### **3.3. Tubuh sebagai Arena Kontestasi Kuasa**

Foucault menempatkan tubuh sebagai situs utama di mana kekuasaan bekerja dan ditanamkan. Dalam kasus Tayub, tubuh perempuan menjadi medium utama dalam hubungan kuasa antara seniman dan publik. Kontrol terhadap tubuh penari tidak hanya terjadi melalui tindakan fisik (seperti saweran yang invasif), tetapi juga melalui pembentukan diskursus sosial yang mereduksi identitas penari menjadi semata-mata objek hiburan.

Dalam praktik kesenian Tayub, tubuh penari perempuan tidak hanya menjadi medium artistik dalam penyampaian ekspresi budaya, tetapi juga menjadi titik sentral dalam permainan kuasa yang kompleks. Tubuh, dalam konteks ini, merupakan arena di mana berbagai bentuk kekuasaan saling bersilangan baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun simbolik. Mengacu pada teori relasi kuasa Michel Foucault, tubuh bukan hanya objek pasif dari dominasi kekuasaan, melainkan juga subjek yang didisiplinkan, diawasi, dan diproduksi oleh struktur sosial.

Sejak awal, tubuh penari Tayub telah dimaknai sebagai alat pertunjukan yang harus tampil memikat, lentur, dan mengundang keterlibatan penonton. Dalam praktiknya, tubuh tersebut kemudian dipolitisasi: dikontrol oleh pemilik sanggar, dikonsumsi oleh penonton, dan dipelintir oleh wacana masyarakat. Penari dipaksa untuk menginternalisasi standar tertentu mereka harus tersenyum, bersikap ramah, dan tidak menunjukkan penolakan meskipun berhadapan dengan perlakuan seksual yang melecehkan. Hal ini merupakan bentuk nyata dari mekanisme disiplin tubuh, di mana kekuasaan bekerja bukan secara koersif, melainkan melalui internalisasi norma-norma sosial.

Lebih jauh, tubuh penari dalam Tayub juga menjadi objek komodifikasi ekonomi. Melalui praktik saweran, tubuh penari dipertukarkan secara simbolik dan material. Penonton merasa berhak menyentuh, merangkul, bahkan melecehkan penari karena telah “membayar” melalui uang sawer. Dalam hal ini, tubuh menjadi barang dagangan dalam sistem pasar budaya lokal, di mana perempuan harus menjual keintiman untuk kelangsungan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa kuasa tidak hanya bekerja dalam bentuk dominasi fisik, tetapi juga melalui relasi transaksi yang mengikat secara struktural.

Tubuh penari juga dikonstruksi secara sosial melalui stigma dan labelisasi negatif. Perempuan yang menjadi penari Tayub kerap diposisikan sebagai “perempuan nakal”, “tidak bermoral”, atau bahkan “pelacur berkedok seni”. Masyarakat tidak memandang tubuh mereka sebagai simbol ekspresi budaya,

melainkan sebagai representasi erotisme yang keluar dari batas kesusilaan. Pandangan ini bukan hanya mengalienasi penari dari komunitas sosialnya, tetapi juga memperkuat dominasi laki-laki atas ruang dan narasi budaya lokal.

Dalam kondisi demikian, penari kehilangan otonomi atas tubuhnya sendiri. Mereka tidak memiliki ruang untuk menentukan batasan personal karena tekanan budaya, ekonomi, dan sosial menuntut mereka untuk terus menyesuaikan diri dengan ekspektasi publik. Kuasa yang bekerja melalui mekanisme ini bersifat produktif, bukan represif, dalam arti membentuk identitas, perilaku, dan pola pikir penari mengenai tubuh dan seksualitasnya.

Menariknya, tubuh juga menjadi ruang perlawanan diam-diam. Beberapa penari mengembangkan strategi negosiasi, seperti membatasi waktu interaksi, menjaga jarak dengan penonton tertentu, atau menolak saweran yang bersifat melecehkan. Namun demikian, ruang resistensi ini sangat terbatas, karena tidak didukung oleh sistem sosial dan kelembagaan yang berpihak pada perlindungan pekerja seni perempuan.

Dalam kerangka pemikiran Foucault, tubuh penari Tayub adalah medan kontestasi antara struktur kekuasaan yang menindas dan potensi subjek untuk membebaskan diri. Tubuh bukan hanya tempat kekuasaan bekerja, tetapi juga titik mula dari kemungkinan untuk menantang kekuasaan itu sendiri. Maka dari itu, memahami tubuh penari sebagai arena kontestasi kuasa membuka ruang analisis yang tidak hanya melihat pelecehan sebagai insiden, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang perlu dikritisi secara menyeluruh.

Pelecehan seksual yang diterima penari Tayub merupakan bentuk nyata dari disiplin tubuh, di mana kekuasaan memproduksi bentuk-bentuk keterpaksaan dalam representasi dan ekspresi. Penari dituntut untuk tampil memikat, menyenangkan penonton, dan menerima sentuhan atau interaksi fisik tanpa penolakan demi mempertahankan ruang kerjanya. Dalam hal ini, tubuh penari tidak hanya dikendalikan secara eksternal, tetapi juga secara internal melalui normalisasi peran dan ekspektasi budaya.

### 3.4. Normalisasi Pelecehan dan Produksi Subjektivitas

Relasi kuasa dalam kesenian Tayub juga berperan dalam membentuk subjektivitas penari, yakni bagaimana para penari memahami dan memaknai diri mereka sendiri. Proses ini sejalan dengan konsep subjek tertundukkan (*subjugated subject*) dalam pemikiran Foucault. Penari bukan hanya dikendalikan oleh kuasa luar, tetapi juga membentuk pemaknaan diri mereka berdasarkan logika kuasa yang berlaku.

Dalam praktik kesenian Tayub di Bojonegoro, pelecehan seksual terhadap penari tidak lagi dipandang sebagai bentuk kekerasan yang menyimpang, melainkan telah dinormalisasi oleh struktur budaya dan sosial masyarakat. Tindakan-tindakan seperti menyentuh tubuh penari tanpa izin, menyelipkan uang ke bagian tubuh pribadi, melontarkan komentar seksual, dan bentuk interaksi tidak etis lainnya, seringkali dianggap sebagai bagian dari “keunikan tradisi” dan “kewajaran dalam hiburan”.

Proses normalisasi ini terjadi karena tindakan pelecehan dikemas dalam bingkai tradisi lokal yang tidak memberikan ruang kritik, serta diperkuat oleh absennya perlindungan hukum dan etika pertunjukan. Akibatnya, bentuk-bentuk kekerasan terhadap tubuh perempuan dalam ruang pentas dianggap sah, selama tidak mengganggu jalannya pertunjukan atau melanggar kesepakatan informal antara penari dan penyelenggara.

Menggunakan pendekatan teori relasi kuasa Michel Foucault, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai bentuk kuasa yang tidak bekerja secara represif, tetapi produktif yakni menciptakan norma, etika, bahkan identitas sosial. Kuasa tersebut mengalir melalui mekanisme sosial seperti bahasa, interaksi, dan kebiasaan, yang secara berulang membentuk pengertian bersama bahwa penari Tayub memang “harus siap” dengan segala bentuk perlakuan dari penonton.

Dalam konteks ini, tubuh penari menjadi medium utama dari proses produksi subjektivitas. Penari tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi juga subjek yang menginternalisasi nilai-nilai dominan tersebut. Beberapa penari mengungkapkan bahwa mereka merasa “harus kuat mental”, “tidak boleh baper”, atau bahkan “tidak bisa protes kalau ingin terus dipanggil tampil.” Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa penari membentuk identitas dan kesadaran diri berdasarkan logika kuasa yang telah mereka serap secara terus-menerus.

Konstruksi identitas ini pada dasarnya mencerminkan keberhasilan kekuasaan dalam menundukkan tubuh dan kesadaran melalui apa yang disebut Foucault sebagai disiplin sosial dan panoptik budaya. Penari tidak hanya diawasi secara langsung oleh penonton dan penyelenggara, tetapi juga oleh norma-norma sosial yang telah tertanam dalam kesadaran mereka sendiri. Pengawasan ini membuat penari secara otomatis menyesuaikan diri tanpa perlu adanya kekerasan terbuka.

Lebih jauh, pelecehan yang dinormalisasi tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi. Praktik saweran, yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi penari, kerap digunakan sebagai justifikasi oleh penonton untuk menyentuh tubuh penari. Dalam situasi ini, ekonomi memperkuat ketimpangan relasi kuasa: semakin besar ketergantungan ekonomi, semakin lemah posisi tawar penari dalam mempertahankan integritas tubuhnya.

Dengan demikian, pelecehan seksual dalam Tayub bukan semata-mata bentuk kekerasan personal, tetapi merupakan manifestasi dari sistem kuasa yang kompleks dan tersusun secara sosial, kultural, dan ekonomi. Produksi subjektivitas melalui normalisasi kekerasan ini tidak hanya membentuk cara penari memandang dirinya sendiri, tetapi juga mereproduksi kekuasaan secara terus-menerus dalam praktik budaya.

### **3.5. Kuasa Ekonomi dan Kuasa Simbolik sebagai Mekanisme Dominasi**

Dalam kehidupan sehari-hari para penari Tayub di Bojonegoro, kuasa ekonomi menjadi salah satu kekuatan paling nyata yang membentuk pola interaksi dan ketundukan mereka. Sebagian besar penari berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Bagi mereka, menjadi penari bukan sekadar menjalani profesi seni, tetapi juga menjadi sumber penghasilan utama yang menopang kehidupan keluarga. Dari pentas ke pentas, mereka menggantungkan penghidupan mereka, baik dari bayaran resmi pertunjukan maupun dari praktik saweran yang berlangsung selama pementasan.

Praktik saweran menjadi bentuk nyata dari kuasa ekonomi dalam hubungan antara penari dan penonton. Tidak jarang penonton yang memberi uang merasa memiliki hak istimewa atas tubuh penari. Mereka merasa bebas untuk menyentuh, memeluk, bahkan menyelipkan uang ke bagian tubuh penari dengan alasan “sudah biasa”. Penari pun sering kali menerima tindakan tersebut dengan diam atau senyum terpaksa, bukan karena tidak terganggu, tetapi karena mereka tidak memiliki posisi tawar untuk menolak. Menolak berarti berisiko tidak lagi dipanggil untuk tampil, kehilangan penghasilan, atau bahkan dijaui oleh sesama pekerja seni.

Di sisi lain, penari juga menghadapi kuasa yang lebih halus namun tak kalah kuat: kuasa simbolik. Penari Tayub tidak hanya mengalami tekanan ekonomi, tetapi juga menghadapi pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Mereka sering diberi label sebagai “perempuan penghibur”, “tidak baik-baik”, atau dianggap dekat dengan dunia prostitusi. Pandangan ini melekat kuat dan berdampak besar terhadap cara masyarakat memperlakukan mereka—tidak jarang penari dikucilkan, direndahkan, bahkan dijadikan bahan gosip di lingkungan tempat tinggal mereka.

Label dan stigma tersebut membuat penari tidak memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan keluhan, apalagi untuk menuntut perlindungan. Bahkan ketika mereka mengalami pelecehan, suara mereka sering tidak didengar atau justru disalahkan. Banyak yang merasa bahwa apa yang mereka alami adalah bagian dari risiko pekerjaan, sesuatu yang harus diterima jika ingin tetap bertahan di dunia pertunjukan. Pandangan ini pun akhirnya diinternalisasi oleh para penari sendiri. Mereka merasa harus

kuat, tidak boleh mempermasalahkan hal-hal kecil, dan menjaga sikap “profesional” meskipun dalam hati merasa dilecehkan dan tidak dihargai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi terhadap penari tidak hanya terjadi secara fisik dalam bentuk pelecehan langsung, tetapi juga terjadi secara simbolik dalam cara masyarakat membingkai peran dan posisi mereka. Tubuh penari bukan hanya dilihat sebagai bagian dari seni, tetapi juga sebagai objek konsumsi publik yang bisa diakses siapa saja, selama mereka memiliki kuasa baik dalam bentuk uang maupun status sosial.

Hubungan antara kuasa ekonomi dan simbolik ini membentuk suatu lingkaran yang saling menguatkan. Ketika penari berada dalam posisi ekonomi yang lemah, mereka cenderung lebih mudah menerima perlakuan melecehkan. Sementara itu, stigma yang melekat pada diri mereka membuat masyarakat menganggap bahwa penari memang pantas menerima perlakuan seperti itu. Dalam situasi ini, pelecehan tidak lagi dianggap sebagai kekerasan, tetapi sebagai bagian dari budaya pertunjukan yang telah berlangsung lama.

Di sisi lain, kuasa simbolik (termasuk labeling, stereotip, dan stigma sosial) memperkuat dominasi tersebut. Penari dianggap tidak bermoral hanya karena menjalankan profesinya, dan konsekuensinya mereka kerap dikucilkan dari ruang sosial formal. Ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam Tayub bukan hanya bersifat fisik dan ekonomi, tetapi juga ideologis—mengatur cara berpikir masyarakat terhadap seksualitas perempuan dan ruang budaya.

### **3.6. Disiplin dan Biopolitik dalam Sistem Pertunjukan Tradisional**

Foucault juga menekankan bahwa kekuasaan modern tidak lagi mengandalkan kekerasan fisik secara langsung, melainkan bekerja melalui disiplin dan biopolitik mekanisme pengaturan terhadap populasi dan tubuh dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam kesenian Tayub, biopolitik tampak dalam bagaimana tubuh perempuan diatur, ditampilkan, dan dikomodifikasi sebagai bagian dari sistem pertunjukan. Penari tidak sekadar menari; tubuh mereka menjadi instrumen kontrol budaya yang dikendalikan oleh norma, tata acara, dan logika pasar.

Dalam kesenian Tayub, tubuh penari bukan sekadar instrumen seni, tetapi juga merupakan objek dari kekuasaan yang bekerja secara halus dan sistematis. Kekuasaan itu hadir dalam bentuk disiplin sosial dan biopolitik, sebagaimana dijelaskan oleh Michel Foucault, yakni mekanisme kekuasaan modern yang mengatur tubuh dan kehidupan melalui pengawasan, pengendalian, dan pembentukan kebiasaan.

Penari Tayub sejak awal sudah dituntut untuk bersikap tertentu: ramah, sopan, menerima siapa pun yang mengajak menari, tersenyum di atas panggung, dan tidak menunjukkan perasaan terganggu meskipun mengalami perlakuan yang melecehkan. Aturan-aturan tersebut tidak tertulis, tetapi sangat kuat dan ditaati. Inilah bentuk disiplin tubuh, di mana tubuh penari dibentuk oleh norma dan pengawasan yang terus-menerus, baik dari penonton, penyelenggara, maupun sesama penari.

Pengawasan ini bukan dalam bentuk fisik yang kasar, melainkan melalui harapan sosial yang membentuk kesadaran penari akan bagaimana mereka harus bersikap. Penari belajar bahwa mereka harus tunduk pada bentuk pertunjukan yang telah berlangsung turun-temurun, dan dalam banyak kasus, mereka pun merasa tidak memiliki pilihan lain selain menyesuaikan diri. Dalam situasi seperti ini, penari menjadi bagian dari sistem panoptik sosial, yakni sistem pengawasan tidak kasatmata yang membuat individu mengawasi dan mengendalikan dirinya sendiri berdasarkan ketakutan akan penilaian publik.

Selain disiplin, sistem pertunjukan Tayub juga mempraktikkan apa yang oleh Foucault disebut sebagai biopolitik: kekuasaan yang mengatur dan mengontrol kehidupan populasi, termasuk tubuh perempuan, melalui struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Tubuh penari Tayub diatur dalam hal jam kerja, cara berpakaian, ekspresi wajah, bahkan intensitas interaksi dengan penonton. Semua diatur bukan oleh hukum tertulis, tetapi oleh sistem pertunjukan dan logika pasar budaya yang sudah diterima sebagai kebiasaan.

Saweran, misalnya, adalah bentuk kontrol biopolitik. Terlihat sebagai pemberian sukarela, tetapi di balik itu terdapat tuntutan agar penari membalas dengan senyum, kedekatan fisik, atau gestur tertentu yang menyenangkan penonton. Jika tidak, maka penari dianggap tidak profesional dan bisa kehilangan panggilan tampil. Artinya, tubuh penari dipertukarkan dalam relasi yang sangat terstruktur secara sosial dan ekonomi, di mana mereka dijaga untuk tetap produktif dan “menguntungkan” dalam sistem hiburan.

Disiplin dan biopolitik ini menciptakan kondisi di mana penari tidak hanya tunduk secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan simbolik. Mereka tidak hanya dikendalikan oleh aturan luar, tetapi juga mengendalikan dirinya sendiri untuk tetap sesuai dengan harapan masyarakat. Tubuh mereka menjadi subjek dari kontrol sosial dan sekaligus objek dari konsumsi budaya.

Sistem ini memperlihatkan bahwa pertunjukan tradisional seperti Tayub bukanlah ruang netral bagi ekspresi budaya, melainkan ruang yang sarat dengan relasi kuasa. Dalam ruang ini, tubuh perempuan dikonstruksi, dikendalikan, dan dikomodifikasi oleh kekuasaan yang bekerja tidak melalui kekerasan terbuka, melainkan melalui pengaturan hidup sehari-hari, pembentukan kebiasaan, dan penciptaan standar sikap.

### 3.7. Kritik terhadap Struktur Sosial: Kuasa, Gender, dan Kekerasan Simbolik

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik pelecehan seksual dalam Tayub adalah hasil dari interseksi antara relasi gender, struktur ekonomi, dan konstruksi sosial-budaya yang saling menguatkan. Teori Foucault membantu menjelaskan bahwa relasi kuasa tidak terpusat, tetapi tersebar dalam jaringan yang bekerja melalui simbol, norma, dan pengawasan.

Fenomena pelecehan seksual terhadap penari Tayub di Bojonegoro tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh subur dalam sebuah struktur sosial yang melegitimasi kekuasaan berbasis gender, membungkam suara perempuan, dan mereproduksi praktik kekerasan melalui simbol-simbol budaya yang tampak “biasa” dan “lumrah”. Kuasa dalam konteks ini tidak selalu bersifat memaksa secara fisik, melainkan bekerja melalui norma-norma sosial, tradisi, serta sistem ekonomi budaya yang telah mapan.

Sistem sosial yang patriarkal menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam hampir semua ranah kehidupan, termasuk dalam ruang budaya tradisional seperti Tayub. Dalam relasi tersebut, Perempuan khususnya penari diposisikan secara subordinat. Mereka bukan hanya harus menyenangkan penonton laki-laki, tetapi juga dituntut untuk mematuhi norma-norma pertunjukan yang dikendalikan oleh struktur maskulin: bagaimana mereka berpakaian, bergerak, dan bahkan tersenyum. Kuasa laki-laki tidak hanya terlihat dalam tindakan eksplisit, tetapi juga dalam bentuk penguasaan wacana, pengaturan simbol, dan penentuan nilai-nilai moral.

Penari Tayub tidak hanya menjadi korban dari tindakan individual penonton yang melecehkan, tetapi juga korban dari sistem nilai yang membentuk bagaimana masyarakat memahami tubuh perempuan. Mereka dianggap tidak layak untuk dihormati, tidak perlu dilindungi, dan selalu menjadi pihak yang patut disalahkan ketika terjadi pelanggaran. Inilah bentuk kekerasan kekuasaan yang bekerja melalui makna, simbol, dan persepsi yang diinternalisasi oleh masyarakat, sehingga penindasan tampak seperti kewajiban.

Di sisi lain, budaya Tayub sendiri telah dijalankan dalam kerangka tradisi yang kaku dan konservatif. Wacana, “kelestarian budaya” dan “otentisitas tradisi” sering kali digunakan untuk menolak kritik dan perubahan. Hal ini menjadikan ruang budaya menjadi situs resistensi terhadap ide-ide progresif tentang hak perempuan dan keadilan gender. Siapa pun yang mencoba mengusulkan batasan etika dalam pertunjukan akan dianggap sebagai ancaman terhadap warisan budaya lokal. Akibatnya, ketimpangan kuasa dan kekerasan yang terjadi dalam Tayub terus direproduksi dari generasi ke generasi.

Struktur sosial seperti ini memerlukan kritik mendalam, karena di dalamnya tertanam sistem dominasi yang tidak tampak, namun sangat efektif: melalui pengawasan sosial, melalui pengulangan simbol, dan melalui pembentukan identitas yang dilekatkan secara paksa pada tubuh perempuan. Kuasa dalam

konteks ini menjadi tersembunyi, menyatu dalam keseharian, dan justru semakin kuat karena ia tidak dipertanyakan.

Dengan mengangkat persoalan ini, penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual dalam kesenian tradisional tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan moral atau hukum. Ia harus dibongkar dari akarnya dengan membongkar simbol, menantang dominasi laki-laki dalam ruang budaya, dan membangun struktur sosial yang adil terhadap tubuh dan identitas perempuan. Kritik ini bukan hanya terhadap tindakan, tetapi terhadap sistem yang membuat tindakan itu mungkin terjadi dan terus berlangsung.

Kekerasan yang dialami penari bukan sekadar tindakan individual, tetapi merupakan manifestasi dari sistem kekuasaan yang terstruktur dan normal. Oleh karena itu, perubahan terhadap kondisi ini tidak cukup melalui pendekatan hukum atau moralitas saja, melainkan memerlukan rekonstruksi wacana budaya, penguatan posisi tawar pekerja seni perempuan, serta perlindungan kelembagaan dalam sektor seni tradisi.

#### 4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelecehan seksual terhadap penari Tayub di Bojonegoro tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individu, melainkan sebagai produk dari relasi kuasa yang kompleks dan terstruktur dalam budaya patriarkal, sistem ekonomi lokal, serta norma sosial yang telah terlembaga. Tubuh penari Tayub menjadi titik pusat dari kontestasi berbagai bentuk kekuasaan dikendalikan melalui disiplin sosial, dikomodifikasi melalui logika pasar hiburan, dan dimaknai ulang melalui wacana budaya yang menormalisasi kekerasan seksual.

Dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, penelitian ini mengungkap bahwa kuasa tidak hanya hadir dalam bentuk dominasi fisik, tetapi juga bekerja secara simbolik dan produktif mengatur tubuh, membentuk identitas, serta menciptakan bentuk-bentuk penerimaan terhadap kekerasan yang dilegitimasi oleh tradisi dan ekonomi. Penari tidak hanya menjadi korban pelecehan, tetapi juga subjek yang diproduksi oleh sistem nilai yang mewajibkan mereka untuk patuh, diam, dan menyesuaikan diri.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya pembacaan ulang terhadap kesenian tradisional dengan perspektif gender dan kekuasaan. Tayub sebagai ekspresi budaya seharusnya menjadi ruang penghormatan terhadap tubuh dan agensi perempuan, bukan sekadar ajang reproduksi relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, transformasi terhadap sistem pertunjukan tradisional harus dimulai dari pembongkaran wacana yang menindas, penciptaan ruang perlindungan terhadap penari, serta perumusan kebijakan budaya yang adil, setara, dan berbasis hak asasi manusia.

Relasi kuasa dalam Tayub menciptakan ruang yang melegitimasi kekerasan seksual. Kekuasaan bekerja melalui budaya, sosial, ekonomi, dan agama. Penari berada dalam posisi rentan karena struktur sosial yang menindas. Perlindungan hukum, pembacaan ulang budaya, dan edukasi publik sangat dibutuhkan untuk membongkar normalisasi kekerasan dalam ruang budaya.

**Daftar Pustaka**

- [1] Berger, John. 1977. *Ways of Seeing*. United States of America: Penguin Books.
- [2] Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Harvard University Press.
- [3] Foucault, Michel. 1978. *The History of Sexuality Vol. 1: An Introduction*. New York: Pantheon Books.
- [4] Foucault, Michel. 1995. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- [5] Kristianto, Daniel. 2018. *Tari Tradisional dan Gender: Studi Relasi Kuasa dalam Seni Pertunjukan*. Yogyakarta: Ombak.
- [6] Piliang, Yasraf Amir. 2010. "Semiotika sebagai Metode dalam Penelitian Desain." Dalam *Semiotika Budaya*, penyunting oleh Tommy Cristomy dan Untung Yuwono, 87–108. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya.
- [7] Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Sugihastuti & Suharto. 2005. *Feminisme dan Identitas Perempuan: Perspektif Budaya Timur dan Barat*. Yogyakarta: Jalasutra.
- [9] Walby, Sylvia. 1990. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
- [10] Tong, Rosemarie Putnam. 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Boulder: Westview Press.
- [11] Ibrahim, Idi Subandy. 2007. *Budaya Populer sebagai Komoditas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- [12] Mulder, Niels. 2001. *Mistisisme Jawa: Ideologi dalam Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- [13] Setyawati, Anik. 2020. "Relasi Kuasa dalam Tradisi Tayub." *Jurnal Kebudayaan Lokal* 12 (2): 45–56.
- [14] Hapsari, Ratih. 2015. "Tubuh, Perempuan, dan Kekuasaan dalam Seni Tradisional." *Jurnal Gender dan Kebudayaan* 8 (1): 15–30.
- [15] Utami, Ayu. 2012. *Tubuh, Seksualitas, dan Tradisi dalam Representasi Perempuan Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- [16] Hardiman, F. Budi. 2015. *Foucault dan Seksualitas: Wacana, Kekuasaan, dan Tubuh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.